

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi, termasuk dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB berfungsi sebagai dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keterlambatan dalam pengundangan regulasi terkait NJKB sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat realisasi penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mengkaji kewenangan hukum pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB serta menganalisis dampak keterlambatan regulasi terhadap kebijakan fiskal dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah untuk menganalisis kewenangan pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memberikan dasar hukum bagi pemerintah provinsi dalam menetapkan NJKB, keterlambatan dalam penerbitan peraturan menteri menciptakan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Keterlambatan ini berdampak pada efisiensi pemungutan pajak, industri otomotif, serta administrasi pelayanan publik, sehingga menimbulkan konsekuensi ekonomi dan administratif di tingkat daerah. Untuk memastikan penetapan NJKB yang tepat waktu dan efektif, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penetapan batas waktu yang jelas dalam regulasi, serta perbaikan mekanisme administratif guna memfasilitasi implementasi kebijakan NJKB. Perbaikan ini sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: otonomi daerah, kewenangan pemerintah provinsi, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), kebijakan fiskal, kepastian hukum.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in Indonesia grants greater authority to provincial governments, including the determination of the *Nilai Jual Kendaraan Bermotor* (NJKB) or Motor Vehicle Sales Value. NJKB serves as the basis for calculating Motor Vehicle Tax (*Pajak Kendaraan Bermotor* or PKB) and Vehicle Title Transfer Fee (*Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor* or BBNKB), which are essential sources of Regional Original Revenue (*Pendapatan Asli Daerah* or PAD). However, the delay in enacting regulations related to NJKB often results in legal uncertainty and disrupts the realization of regional tax revenues. This study examines the legal authority of provincial governments in determining NJKB and analyzes the impact of regulatory delays on fiscal policy and legal certainty. This research employs a normative legal research method, statute approach, conceptual approach, and historical approach to analyze the authority of provincial governments in setting NJKB. The study finds that although the regulatory framework provides the legal basis for provincial governments to determine NJKB, delays in issuing ministerial regulations create gaps in policy implementation. This delay affects the efficiency of tax collection, the automotive industry, and public service administration, leading to economic and administrative consequences at the regional level. To ensure the timely and effective determination of NJKB, this research suggests improving coordination between central and regional governments, establishing clear regulatory deadlines, and enhancing administrative mechanisms to facilitate the implementation of NJKB policies. These improvements are essential for strengthening regional fiscal independence and supporting sustainable development.

Keywords: *regional autonomy, provincial government authority, Motor Vehicle Sales Value (NJKB), fiscal policy, legal certainty.*